

Rekonstruksi Ekonomi Kerakyatan Dalam Dinamika Globalisasi: Perspektif Konseptual dan Empiris

**Dea Salsabila*¹, Devinda Makhbubatul Haliza², Muhammad Annas Musta'in³, Sevia Dwi
Ningsih⁴, Zein Cholifatul Azizah⁵, Siti Maghfiroh⁶**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Corresponding Author: 244110201010@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas rekonstruksi ekonomi kerakyatan sebagai respon terhadap tantangan dan peluang dalam era globalisasi yang ditandai oleh liberalisasi pasar, mobilitas modal lintas negara, dan kemajuan teknologi digital. Konsep ekonomi kerakyatan yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945 menekankan asas kekeluargaan, keadilan sosial, pemerataan, dan partisipasi rakyat dalam pengelolaan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis arah konseptual rekonstruksi ekonomi kerakyatan, bukti empiris di Indonesia terutama pada sektor UMKM dan koperasi, serta merumuskan strategi kebijakan yang adaptif dan inklusif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ekonomi kerakyatan memiliki peran vital dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tantangan globalisasi menuntut pelaku ekonomi rakyat untuk bertransformasi melalui inovasi, digitalisasi, dan adaptasi nilai. Artikel ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, literasi digital, dan kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi besar sebagai upaya memperkuat daya saing ekonomi rakyat tanpa mengesampingkan nilai sosial dan keadilan. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi kerakyatan dapat menjadi model pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Ekonomi Kerakyatan, Globalisasi, Keadilan Sosial

Reconstruction of the People's Economy in the Dynamics of Globalization: Conceptual and Empirical Perspectives

Abstract: This article examines the reconstruction of the people's economy in response to the challenges and opportunities of globalization, characterized by market liberalization, cross-border capital mobility, and advances in digital technology. Rooted in Article 33 of the 1945 Constitution, the concept of the people's economy emphasizes kinship, social justice, equity, and public participation in economic management. This study employs a literature review to analyze the conceptual direction of reconstructing the people's economy, empirical evidence in Indonesia, particularly in the MSME and cooperative sectors, and adaptive and inclusive policy strategies. The findings indicate that although the people's economy plays an important role in employment absorption and local economic growth, globalization requires grassroots economic actors to transform through innovation, digitalization, and value adaptation. The article recommends strengthening institutions, expanding access to financing, improving digital literacy, and fostering collaboration between MSMEs and larger economic actors to enhance competitiveness without neglecting social values and justice. Thus, reconstructing the people's economy can provide an inclusive and sustainable approach to national development oriented toward shared prosperity.

Keywords: people's economy, globalization, social justice

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah struktur dan arah perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Liberalisasi perdagangan mendorong integrasi pasar lintas negara sehingga kegiatan perdagangan, investasi, dan pertukaran teknologi semakin terhubung. Proses ini memfasilitasi masuknya modal asing, perluasan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, serta percepatan transformasi digital. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi tersebut membuka peluang untuk berpartisipasi lebih intensif dalam perekonomian global.

Namun, perubahan dan transformasi tersebut juga menimbulkan beberapa tantangan, antara lain meningkatnya ketergantungan terhadap modal asing, kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan perekonomian global, serta melebarnya kesenjangan atau *gap* di bidang sosial dan ekonomi antara pelaku usaha berskala besar dan kecil. Dalam beberapa kasus, liberalisasi perdagangan dan dominasi perusahaan multinasional meningkatkan tekanan persaingan terhadap pelaku usaha lokal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan lokal yang menghadapi persaingan dengan produk impor dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan pengurangan tenaga kerja.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, UMKM merupakan salah satu unsur utama perekonomian rakyat. UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga disebut menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja serta menghimpun 60,4% dari total investasi pada semester I 2021. Data tersebut menunjukkan pentingnya peran UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Ekonomi kerakyatan sebagai konsep Pembangunan ekonomi yang berbasis pada rakyat, sebenarnya memiliki akar filosofis yang kuat dalam konstitusi Indonesia, terutama Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan juga pemerataan, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya. Namun, dalam praktiknya, orientasi pembangunan ekonomi nasional cenderung terjebak dalam paradigma kapitalistik dan pasar bebas, yang sering kali menggeser nilai-nilai kerakyatan menuju komersialisasi dan individualisasi ekonomi.

Berdasarkan dari realitas tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan bagaimana konsep ekonomi kerakyatan dapat direkonstruksi agar adaptif terhadap tantangan globalisasi, serta bagaimana bukti-bukti empiris di Indonesia dapat digunakan untuk menunjukkan keberhasilan maupun keterbatasan penerapannya. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan model kebijakan yang dapat memperkuat daya saing ekonomi rakyat di tengah kompetisi global tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar ekonomi konstitusional yang berasaskan gotong royong dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual arah dan dasar rekonstruksi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi globalisasi; mengidentifikasi bukti empiris penerapannya di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi lokal; serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan pada era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan paradigma ekonomi nasional yang berkeadilan sekaligus menawarkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

1. Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, keadilan sosial, pemerataan, dan partisipasi rakyat. Konsep ini berakar pada semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, ekonomi kerakyatan tidak sekadar dipahami sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi sebagai paradigma pembangunan nasional yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.

Mubyarto (1987) menjelaskan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk penerapan konsep Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dan keadilan, menolak eksploitasi manusia oleh manusia, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Konsep ini menekankan tiga prinsip utama: (1) orientasi pada kebutuhan rakyat banyak, bukan keuntungan segelintir pihak; (2) distribusi hasil pembangunan yang merata; dan (3) kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan basis lokal.

Suroso dan Budiarto (2021) menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan perlu diinterpretasikan sebagai model pembangunan berbasis kelembagaan sosial, bukan semata-mata mekanisme pasar. Keberhasilan ekonomi kerakyatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, partisipasi kolektif, dan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya secara bersama. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan menawarkan koreksi terhadap model ekonomi yang menempatkan mekanisme pasar sebagai aktor dominan tanpa dukungan kelembagaan sosial yang memadai.

Ekonomi kerakyatan memiliki sejumlah dimensi penting yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai yang berpihak pada rakyat, kebersamaan, dan keadilan. Dimensi sosial menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan solidaritas antarwarga sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Konsep ini mendorong partisipasi kolektif masyarakat dalam mengelola sumber daya sehingga terbentuk jaringan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan kompetisi individual, ekonomi kerakyatan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang saling mendukung melalui gotong royong dan koperasi. Dengan demikian, dimensi sosial berperan dalam membangun resiliensi ekonomi lokal, yang keberhasilannya tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari harmoni sosial dan distribusi manfaat yang adil.

Dimensi moral dalam ekonomi kerakyatan berakar pada nilai-nilai etika Pancasila, seperti keadilan sosial dan penolakan terhadap eksploitasi. Konsep ini menempatkan moralitas sebagai landasan kegiatan ekonomi dengan menghindari praktik yang merugikan pihak lain, seperti monopoli atau spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Orientasi ekonomi rakyat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, bukan semata-mata keuntungan segelintir pihak, sehingga pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Dimensi kelembagaan ekonomi rakyat mencakup struktur sosial dan institusi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi, seperti koperasi, badan usaha milik desa, dan lembaga adat. Kelembagaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga memuat norma sosial, aturan kolektif, dan jaringan komunitas yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya secara demokratis. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi rakyat sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusi lokal yang mampu mengintegrasikan aspek sosial, moral, dan ekonomi secara inklusif dan partisipatif.

Teori People-Centred Development (PCD) menempatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*), kedaulatan, dan pilihan masyarakat atas kehidupan sehari-hari sebagai pusat pembangunan. Pembangunan dipahami tidak semata-mata sebagai proses yang dipaksakan dari luar, tetapi sebagai proses yang tumbuh dari dalam (*indigenous process*) sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip tersebut menekankan kolektivitas serta kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan konteks dan kapasitas yang dimiliki.

Relevansi PCD terhadap ekonomi kerakyatan terletak pada penempatan manusia sebagai pusat sekaligus tujuan akhir aktivitas pembangunan. Keduanya menekankan peningkatan kesejahteraan melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola aktivitas ekonomi, penerapan prinsip keadilan, perhatian terhadap kelompok rentan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Pemerintah dalam kerangka ini berperan menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

2. Hubungan antara Ekonomi Kerakyatan dan Globalisasi

Hubungan antara ekonomi kerakyatan dan globalisasi bersifat kompleks. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan. Ekonomi kerakyatan berorientasi pada kemandirian dan pemerataan, sedangkan globalisasi sering dikaitkan dengan liberalisasi pasar dan konsentrasi ekonomi. Namun, apabila dikelola secara strategis, globalisasi dapat menjadi peluang bagi pelaku ekonomi rakyat untuk memperluas jaringan produksi, memperoleh teknologi, dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Suroso dan Budiarto (2021) menekankan pentingnya merekonstruksi kelembagaan ekonomi kerakyatan agar mampu beradaptasi dengan perubahan global. Rekonstruksi tersebut mencakup digitalisasi, penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas, serta kebijakan fiskal dan kredit yang berpihak pada pelaku ekonomi kecil. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai strategi adaptif dalam menghadapi perubahan dan tekanan perekonomian global.

3. Dinamika Ekonomi Kerakyatan terhadap Globalisasi

Pada era globalisasi, liberalisasi, integrasi pasar, dan mobilitas modal internasional menjadi faktor penting yang membentuk dinamika ekonomi suatu negara. Proses ini membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan bagi kapasitas negara dalam menjaga ketahanan ekonomi. Liberalisasi pasar keuangan dan perdagangan dapat memperluas akses terhadap pasar, modal, dan teknologi. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat meningkatkan efisiensi,

ketersediaan produk, dan peluang ekspor; di sisi lain, kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas, menekan pelaku lokal yang kurang kompetitif, dan mempersempit ruang kebijakan apabila ketergantungan terhadap arus modal eksternal terlalu tinggi.

Integrasi pasar domestik dan internasional juga mengubah struktur persaingan. Pelaku usaha lokal harus bersaing dengan pelaku nasional maupun internasional yang memiliki skala usaha, modal, dan akses teknologi lebih besar. Kondisi ini dapat menekan margin usaha mikro dan petani skala kecil apabila tidak disertai mekanisme dukungan yang memadai. Selain itu, mobilitas modal internasional dapat memengaruhi ruang kebijakan fiskal dan moneter karena arus modal masuk dan keluar yang cepat menuntut respons kebijakan yang adaptif. Oleh karena itu, dampak globalisasi terhadap ekonomi rakyat sangat bergantung pada kapasitas regulasi, perlindungan sosial, dan kesiapan pelaku usaha.

4. Penyesuaian Nilai dan Praktik Ekonomi Rakyat dalam Konteks Globalisasi.

Dalam era globalisasi, ekonomi dunia menjadi semakin terhubung tanpa batas wilayah. Barang, jasa, dan informasi dapat bergerak lintas negara hanya dalam hitungan detik. Kondisi ini membawa peluang besar sekaligus tantangan baru bagi ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Agar tetap bertahan dan tidak tersingkir oleh persaingan global, pelaku ekonomi rakyat perlu menyesuaikan nilai dan praktik usaha mereka agar lebih adaptif, efisien, dan terbuka terhadap perubahan. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kejujuran, kesederhanaan, dan kemandirian tidak harus ditinggalkan, tetapi perlu diterjemahkan dalam konteks ekonomi modern.

Semangat gotong royong kini dapat diwujudkan melalui kolaborasi bisnis digital, koperasi berbasis digital, atau jaringan mitra UMKM yang saling mendukung dalam promosi dan distribusi produk. Firdaus dan Noviaristanti (2024) menjelaskan bahwa dalam proses transformasi digital, pelaku UMKM perlu menyesuaikan diri terhadap dua hal penting, yaitu perubahan perilaku pasar dan perkembangan teknologi. Konsumen semakin banyak berbelanja secara daring, mencari informasi melalui media sosial, dan menilai produk berdasarkan ulasan digital. Oleh karena itu, praktik ekonomi rakyat yang sebelumnya berbasis hubungan langsung di pasar tradisional perlu diperluas ke pasar digital. Pelaku UMKM juga perlu membangun kepercayaan melalui konten digital, foto produk yang menarik, dan layanan pelanggan yang responsif. Selain itu, profesionalisme dan transparansi menjadi bagian penting dari penyesuaian praktik ekonomi rakyat. Pengelolaan usaha yang disertai pencatatan keuangan dan penggunaan aplikasi keuangan digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus membuka akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan formal.

Penyesuaian nilai juga berarti mengubah pola pikir dari sekadar bertahan menjadi tumbuh dan berdaya saing. Firdaus dan Noviaristanti (2024) menemukan bahwa salah satu hambatan dalam transformasi digital UMKM adalah pola pikir tradisional yang enggan berubah. Di sisi lain, penyesuaian nilai tetap perlu mempertahankan budaya lokal di tengah pengaruh global. Produk UMKM yang mengangkat kearifan lokal, seperti batik, tenun, kuliner tradisional, dan kerajinan tangan, dapat memiliki daya tarik di pasar internasional. Dengan kemasan yang lebih modern dan

strategi pemasaran digital, nilai budaya lokal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan produk lokal dari produk massal industri besar.

Sebagian pelaku usaha kecil masih merasa nyaman dengan cara lama dan ragu mengadopsi teknologi baru. Padahal, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan global. Globalisasi tidak selalu menjadi ancaman, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Karena itu, penyesuaian tidak berarti meniru seluruh praktik global, melainkan menyeleksi dan mengadaptasi unsur yang relevan agar tetap sejalan dengan identitas dan nilai ekonomi kerakyatan. Pemerintah dan lembaga pendukung juga berperan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses digital. Pada akhirnya, penyesuaian nilai dan praktik ekonomi rakyat perlu membangun keseimbangan antara identitas lokal dan tuntutan global sehingga kemajuan digital dapat dimanfaatkan tanpa meninggalkan prinsip solidaritas, kemandirian, dan keberlanjutan sosial.

5. Peran Inovasi, Digitalisasi, dan Ekonomi Kreatif

Inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat daya saing ekonomi rakyat di era globalisasi. Di tengah perubahan cepat akibat kemajuan teknologi dan integrasi pasar dunia, pelaku ekonomi rakyat dituntut untuk berpikir lebih kreatif agar tidak tertinggal. Inovasi bukan hanya berarti menciptakan hal baru, tetapi juga menyesuaikan produk, layanan, dan strategi bisnis dengan kebutuhan zaman. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya hanya berjualan di pasar lokal kini dapat memperluas jangkauan hingga ke tingkat nasional bahkan internasional melalui platform digital.

Digitalisasi berperan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi rakyat. Melalui penerapan teknologi digital, proses produksi, promosi, dan penjualan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Penggunaan media sosial, *e-commerce*, dan sistem pembayaran digital memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Digitalisasi juga membantu pelaku ekonomi rakyat untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan keuntungan melalui pengelolaan usaha yang lebih efektif. Selain efisiensi, digitalisasi juga mendorong terbentuknya praktik bisnis yang lebih transparan dan profesional. Dengan menggunakan aplikasi keuangan dan sistem pencatatan digital, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan secara lebih rapi dan terukur. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan lembaga keuangan sehingga memperluas peluang untuk mendapatkan modal usaha.

Digitalisasi juga membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam jaringan rantai pasok global. Sementara itu, ekonomi kreatif berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk ekonomi rakyat. Sektor ini menempatkan kreativitas, ide, dan inovasi sebagai modal utama dalam menciptakan produk dan layanan yang memiliki keunikan tersendiri. Produk-produk tradisional seperti batik, tenun, kerajinan bambu, dan makanan khas daerah dapat diolah dan dikemas dengan sentuhan modern sehingga memiliki daya tarik tinggi di pasar global. Dengan begitu, ekonomi kreatif bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Lebih jauh, inovasi dan ekonomi kreatif juga membantu pelaku ekonomi rakyat untuk

membedakan diri dari pesaing besar. Dalam pasar global yang sangat kompetitif, produk lokal dengan ciri khas daerah, bahan ramah lingkungan, atau desain orisinal dapat menjadi keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas menjadi kunci penting agar pelaku usaha kecil mampu bersaing dan tetap relevan di tengah perubahan selera konsumen yang dinamis. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat peran inovasi dan ekonomi kreatif melalui kebijakan, regulasi, serta dukungan program pendampingan. Program seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan digitalisasi UMKM, dan dukungan promosi produk lokal membantu memperluas akses pasar. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat mempercepat adaptasi pelaku ekonomi rakyat terhadap perubahan teknologi dan pola konsumsi masyarakat.

Selain itu, inovasi dan digitalisasi juga berperan dalam pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Platform digital memungkinkan pelaku usaha dari desa atau daerah terpencil untuk memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan serta membuka lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal melalui pendekatan kreatif, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya. Secara keseluruhan, peran inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif adalah mengubah cara pandang serta cara kerja pelaku ekonomi rakyat agar lebih modern, adaptif, dan kompetitif. Kombinasi antara teknologi, kreativitas, dan nilai-nilai lokal akan menjadikan ekonomi rakyat tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji konsep, perkembangan, serta bukti empiris mengenai ekonomi kerakyatan dalam menghadapi dinamika globalisasi. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur sekunder yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, UMKM, koperasi, digitalisasi, dan globalisasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber, seleksi literatur, klasifikasi informasi, dan penelaahan isi sumber. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu konsep ekonomi kerakyatan, dinamika globalisasi, peran UMKM dan koperasi, transformasi digital, serta kebijakan penguatan ekonomi rakyat. Sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam analisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, serta temuan empiris yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka. Selanjutnya, analisis tematik

digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) konsep dan nilai dasar ekonomi kerakyatan; (2) hubungan ekonomi kerakyatan dengan globalisasi; (3) tantangan dan peluang ekonomi rakyat; (4) adaptasi nilai dan praktik ekonomi rakyat; (5) peran inovasi dan digitalisasi; serta (6) peran pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Hasil analisis kemudian disintesis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, serta hubungan antartemuan. Sintesis tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan arah rekonstruksi ekonomi kerakyatan yang tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat, sekaligus adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana telah dijelaskan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Arus globalisasi menghadirkan tantangan baru berupa liberalisasi pasar, mobilitas modal lintas negara, serta kompetisi dalam ekonomi digital yang mengubah pola dan mekanisme ekonomi lokal.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, diperlukan rekonstruksi ekonomi kerakyatan. Dalam artikel ini, rekonstruksi dimaknai sebagai upaya memperkuat kembali sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan global dan kemajuan teknologi. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah pola usaha secara cepat sehingga pelaku ekonomi rakyat, termasuk UMKM, perlu menyesuaikan strategi usaha agar tetap relevan.

Pada era globalisasi, pelaku ekonomi rakyat perlu menyesuaikan nilai dan praktik usahanya agar lebih adaptif dan terbuka. Nilai-nilai seperti gotong royong, kerja keras, dan kejujuran tetap menjadi dasar, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, UMKM tidak hanya mengandalkan penjualan langsung di pasar, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan konsumen. Penyesuaian tersebut penting agar ekonomi rakyat tetap relevan dalam integrasi pasar global.

Rekonstruksi ekonomi kerakyatan pada era globalisasi menuntut transformasi kerangka pemikiran ekonomi dari orientasi produksi tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan digitalisasi usaha rakyat. Transformasi tersebut tidak berarti meninggalkan nilai-nilai dasar ekonomi kerakyatan, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan dinamika perekonomian global yang semakin terbuka. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dapat diposisikan sebagai pendekatan pembangunan yang berupaya menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial.

2. Tantangan dan Peluang Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Data empiris yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun, menyerap sekitar 117 juta pekerja atau

97% dari total tenaga kerja, serta menghimpun 60,4% dari total investasi berdasarkan data semester I 2021. Namun, pada era globalisasi, sektor ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, serta ketergantungan pada bahan baku impor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara visi kemandirian ekonomi rakyat dan realitas integrasi pasar global.

Ekonomi global yang ditandai oleh perdagangan bebas, pergerakan modal yang tinggi, dan penetrasi teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi rakyat. Usaha mikro dan kecil mendominasi struktur pelaku usaha di Indonesia dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam menyesuaikan diri dengan pasar global yang semakin terintegrasi.

a) Terbatasnya Akses ke Pembiayaan dan Modal Usaha

Keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi pelaku ekonomi rakyat. Sebagian besar usaha mikro tidak memiliki agunan resmi, laporan keuangan yang lengkap, atau rekam jejak kredit yang diakui oleh lembaga keuangan, sehingga sulit memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan komersial besar yang mendominasi dan belum optimalnya peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT, dan *fintech* syariah, memperbesar kesenjangan dalam akses pembiayaan

b) Tekanan Persaingan dari Produk Global

Liberalisasi perdagangan dan integrasi pasar mempercepat masuknya barang dan jasa dari luar negeri. Produk impor dengan harga yang lebih murah sering kali membuat produk lokal kesulitan bersaing. Contohnya, produk pertanian, tekstil, dan kerajinan buatan dalam negeri sering mengalami kesulitan bersaing akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya efisiensi. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro harus menurunkan harga jual, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka.

c) Lemahnya Daya Saing dan Teknologi Produksi

Mayoritas pelaku ekonomi rakyat masih menggunakan teknologi konvensional yang memiliki tingkat produktivitas rendah. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, penelitian, dan modernisasi peralatan produksi menyebabkan mereka kalah bersaing dengan perusahaan besar atau produk asing yang mengadopsi teknologi otomatisasi dan digitalisasi. Tanpa adanya dukungan kebijakan, seperti insentif untuk inovasi dan pelatihan vokasi, pelaku usaha mikro akan terus mengalami keterbelakangan dalam rantai nilai global.

d) Ketimpangan Akses Pasar dan Informasi Digital

Pelaku ekonomi rakyat biasanya tidak memiliki akses langsung ke pasar modern atau *e-commerce* internasional. Banyak dari mereka bergantung pada tengkulak atau perantara yang mengambil keuntungan besar. Selain itu, rendahnya literasi digital menyebabkan pelaku usaha mikro kesulitan menggunakan platform online untuk promosi, transaksi, dan pembiayaan. Akibatnya, digitalisasi justru memperbesar kesenjangan, di mana hanya pelaku yang menguasai teknologi

yang mampu bertahan.

e) Kelemahan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Kelembagaan ekonomi seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha bersama sering kali masih mengalami kekurangan dalam hal tata kelola yang transparan dan profesional. Hal ini menyebabkan mereka belum mampu berperan secara efektif sebagai sarana bagi pelaku ekonomi rakyat untuk meningkatkan daya tawar, mengelola produksi secara kolektif, maupun mengakses pasar modern.

3. Peran Pemerintah dalam Merekonstruksi Ekonomi Kerakyatan

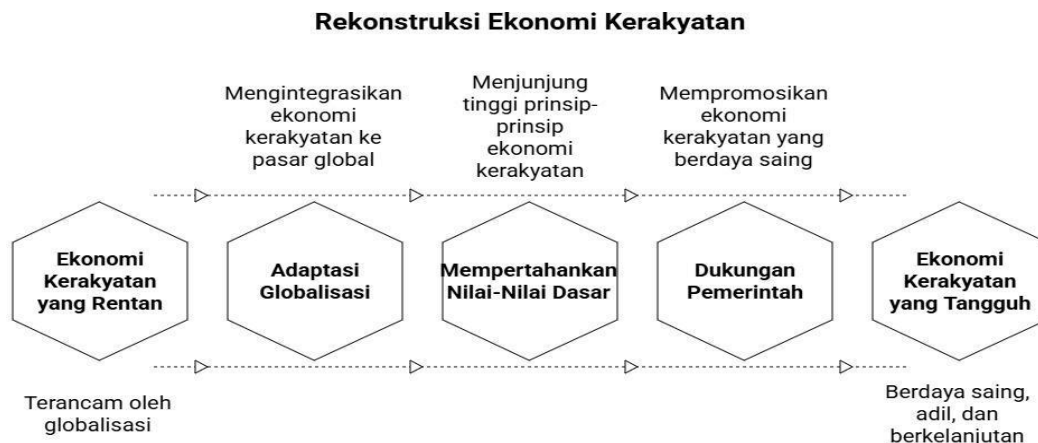
Rekonstruksi ekonomi kerakyatan memerlukan sinkronisasi kebijakan makro dan mikro. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui perbaikan tata kelola koperasi dan BUMDes, memperluas akses permodalan bagi UMKM, serta mendorong digitalisasi sistem distribusi. Menurut Sari (2021), kebijakan ekonomi rakyat yang efektif perlu berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan dengan dukungan regulasi yang mendorong kemitraan antara pelaku usaha kecil dan industri besar.

Selain itu, pemerintah dan lembaga pendukung berperan penting dalam membantu proses adaptasi pelaku ekonomi rakyat. Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses digital dapat meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, e-Smart IKM, dan Rumah BUMN menjadi contoh inisiatif yang menghubungkan nilai-nilai tradisional usaha rakyat dengan inovasi teknologi. Firdaus dan Noviaristanti (2024) menekankan bahwa dukungan eksternal berupa pelatihan dan infrastruktur digital berpengaruh terhadap kesiapan UMKM menghadapi perubahan.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di era digital antara lain:

1. Meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM melalui pelatihan berbasis komunitas.
2. Memperluas akses pembiayaan dan modal usaha, terutama melalui platform digital dan program pemerintah.
3. Mendorong kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar untuk memperluas pasar dan memperkuat rantai pasok.
4. Memanfaatkan potensi ekonomi kreatif seperti kuliner, kerajinan, dan produk lokal berbasis budaya daerah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, rekonstruksi ekonomi kerakyatan dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:



Gambar 1. Rekonstruksi Ekonomi Kerakyatan

KESIMPULAN

Rekonstruksi ekonomi kerakyatan merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh liberalisasi pasar, mobilitas modal internasional, dan perkembangan teknologi digital. Ekonomi kerakyatan yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945 tetap relevan karena menempatkan pemberdayaan rakyat, keadilan sosial, pemerataan, dan partisipasi sebagai dasar pembangunan. Namun, pelaku ekonomi rakyat menghadapi tantangan berupa tekanan persaingan global, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya daya saing teknologi, kesenjangan akses pasar digital, dan kelemahan kelembagaan. Oleh karena itu, rekonstruksi ekonomi kerakyatan perlu diarahkan pada inovasi, digitalisasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan kelembagaan yang inklusif dan adaptif.

Pemerintah dan lembaga pendukung memiliki peran penting melalui kebijakan yang memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan antara UMKM dan pelaku ekonomi besar, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, ekonomi kerakyatan dapat beradaptasi dengan dinamika global tanpa meninggalkan nilai sosial dan keadilan yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, penguatan ekonomi kerakyatan pada era globalisasi perlu menyeimbangkan kemampuan beradaptasi terhadap pasar dan teknologi dengan upaya menjaga kemandirian, pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Faiz, dan Joni Hendra. t.t. *Peran Umkm dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.
- Anjani, Putri Selviana, Bagus Dwi Cahyo, Ellen Praditha, Fakhri Danii Alfarizi, dan Heni Noviarita. 2023. "Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19." *Salam (Islamic Economics Journal)* 4 (1): 1. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.15135>.
- Fatakh, Abdul, Wasman Wasman, dan Rabith Madah Khulaili Harsya.

2022. "Mengembalikan Eksistensi Hukum Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia di Tengah Era Neo-Globalisasi dan Sosialisme Demokratik (Sosdem)." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 7 (1): 43. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10875>.
- Maya Putra, Muhammad Umar, dan Parimin -. 2018. "Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi ASEAN." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 8 (1): 1–12. <https://doi.org/10.55601/jwem.v8i1.466>.
- Pohan, Ibnu Asqori, Aylia Eka Krisdayanti, dan Dakka Bangun. t.t. *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*. 4 (1).
- Ruslina, Elli. 2016. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9 (1): 49. <https://doi.org/10.31078/jk913>.
- Sheng, Tianxiang, dan Jiahui Teng. 2025. "The impact of digital inclusive finance on regional capital aggregation." *Managerial and Decision Economics* 46 (1): 115–28. <https://doi.org/10.1002/mde.4363>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Firdaus, A., & Noviaristanti, E. (2024). Transformasi digital dan adaptasi nilai dalam penguatan daya saing UMKM di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 12(1), 45–60.
- Halim, A. (2020). Revitalisasi ekonomi kerakyatan di era ekonomi global. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(3), 231–245.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perkembangan UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Sari, D. P. (2021). Kebijakan ekonomi rakyat dalam era digitalisasi: Pendekatan inklusif dan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Indonesia*, 8(2), 101–115.
- Soedjatmoko. (1991). *Etika Pembangunan di Dunia Ketiga*. Jakarta: LP3ES.
- Suroso, A., & Budiarto, T. (2021). Rekonstruksi kelembagaan ekonomi kerakyatan di era globalisasi: Pendekatan sosial-ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 9(3), 233–248.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.